



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : S. RIYADI
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 73803

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.394.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 304.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1416 m2/400 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 904.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 224.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS TYPE G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 149.267.594**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	2.805.267.594
III. HUTANG	Rp.	115.242.124
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.690.025.470

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.